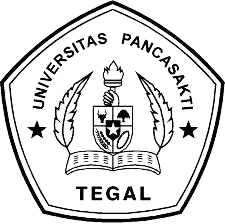
****

**PENGARUH KEKUASAAN OTORITAS PAJAK DAN MORAL PAJAK TERHADAP *TAX EVASION***

**(Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Tegal)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fiarda Ersa Eriska**

**NPM: 43320600137**

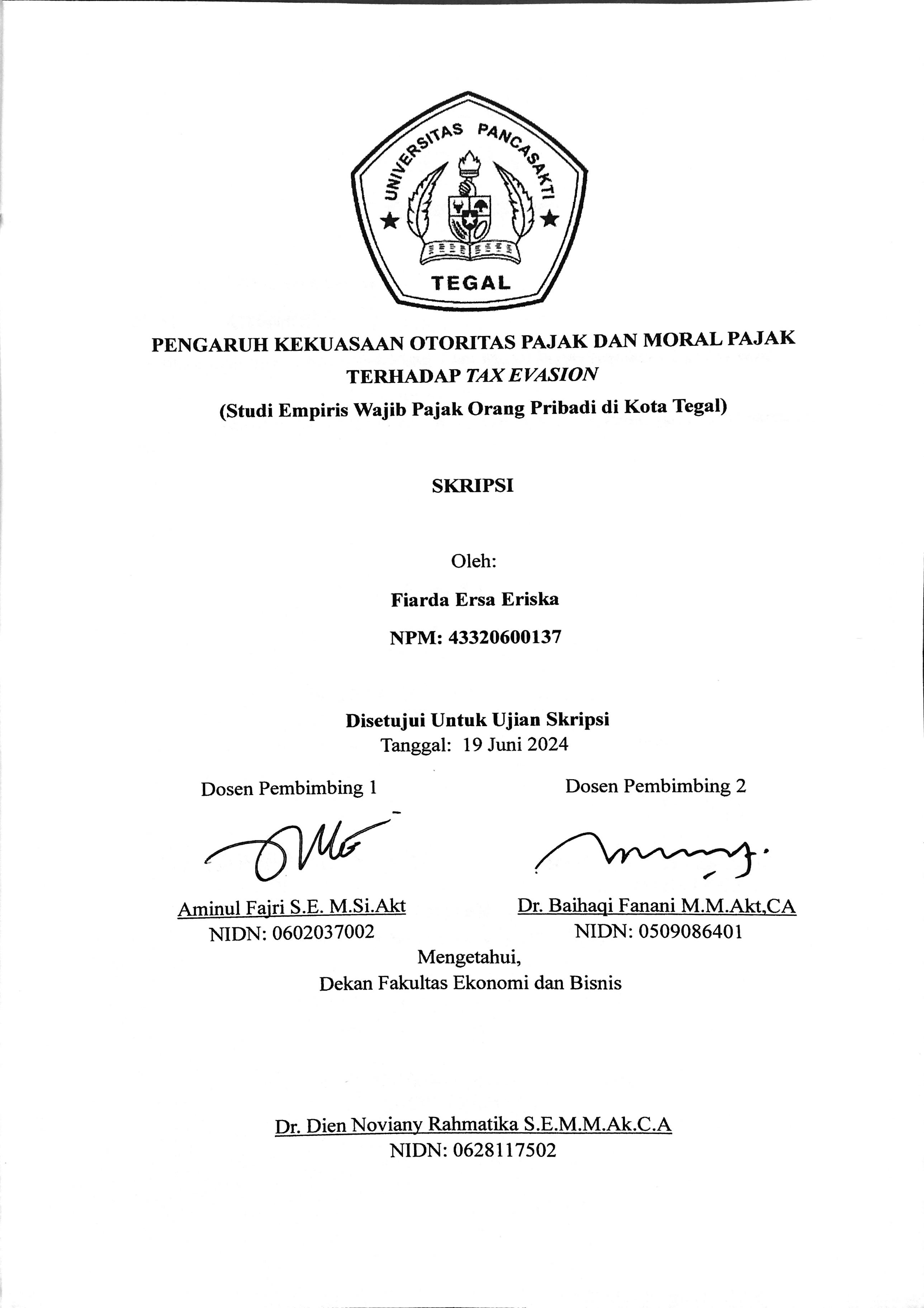
Diajukan Kepada:

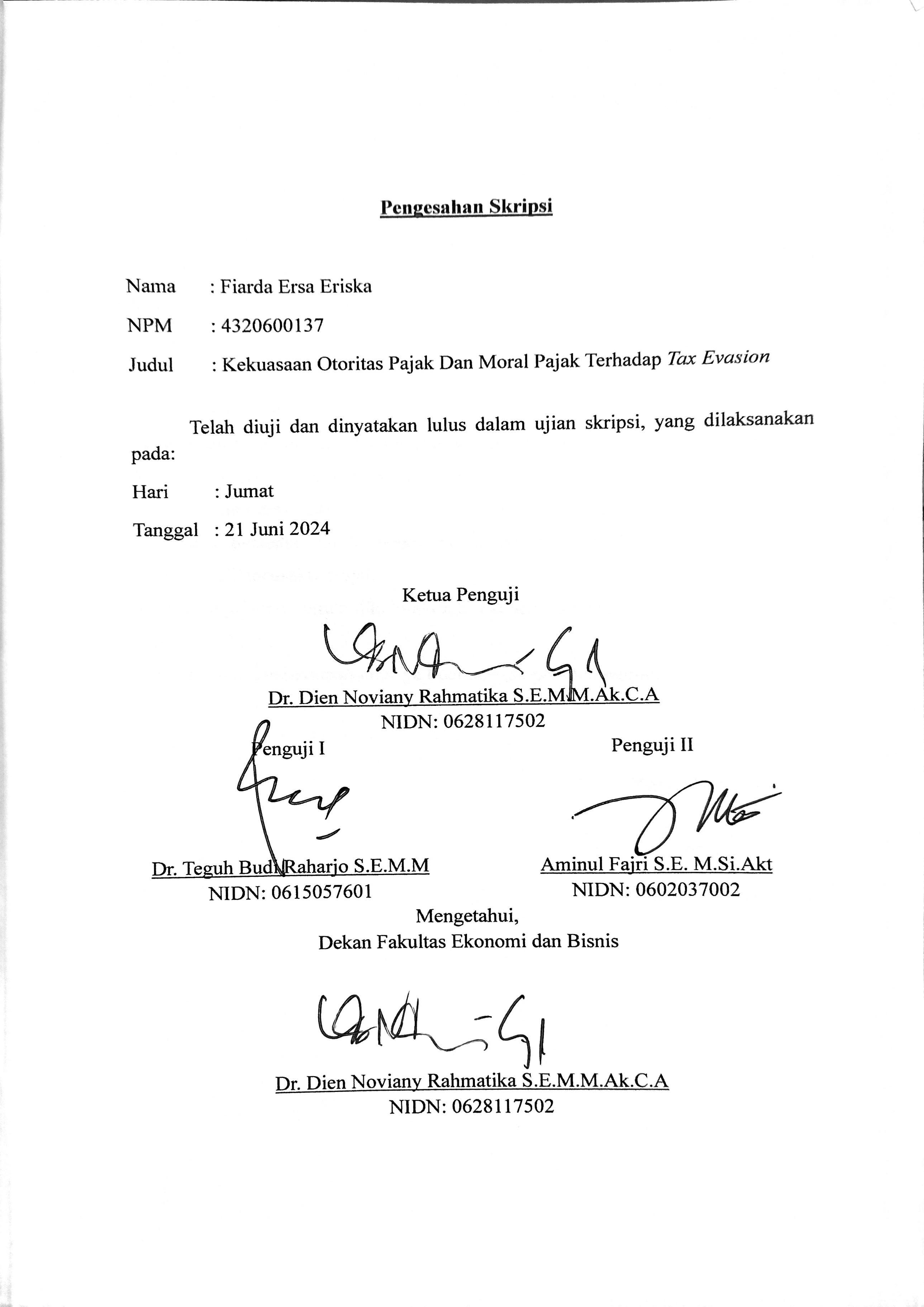
**Program Studi Akuntansi**

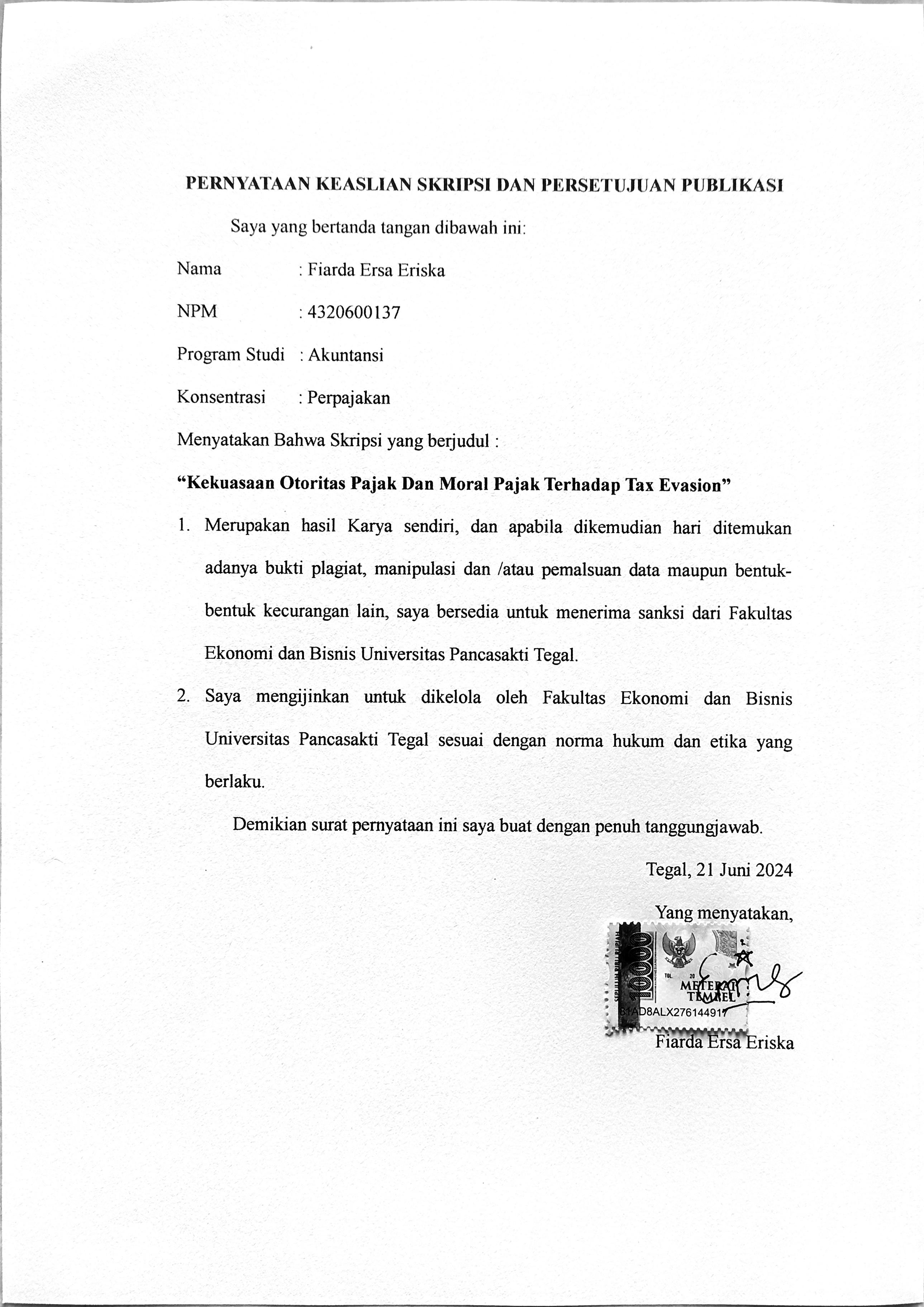
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2024**

****

****



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Prof Dr. P.J.A Adriani mengartikan pajak menjadi iuran yang dibayarkan masyarakat kepada negara secara paksaan dan bersifat terutang bagi wajib pajak berdasarkan kebijakan atau undang-undang, wajib pajak tidak bisa menuntut pemerintah untuk memberikan imbalan atas pajak yang dibayar karena digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum dan berhubungan dengan tugas negara. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat (Indriasih et al., 2022). Alfaruqi, n.d. mengartikan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang harus terus ditingkatkan agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan prinsip kemandirian dan kemampuan sendiri. Namun, pada kenyataannya pembangunan nasional belum optimal dan masih belum dapat berfungsi semestinya jika didapati dari tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar pajak yang masih sedikit. Masyarakat melakukan pelanggaran pajak meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak selaras dengan pembangunan nasional (Kholis & Kurniawati, 2022). Masyarakat sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya atau beban karena dapat mengurangi pendapatan yang diterima (Ningsih & Pusposari, 2014).

*Tax evasion* yang terjadi tahun 2022 di daerah Sulawesi Selatan, dimana DJP Sulselbartra menyita aset pengusaha yang dengan sengaja memaparkan surat keterangan atau pemberitahuan yang salah atau tidak lengkap, ataupun dengan sengaja tidak menyetor pajak yang sudah dipungut, hingga menyebabkan kerugian sekurang-kurangnya Rp 4,3 miliar pada pendapatan negara dari sektor pajak (<https://www.cnbcindonesia.com>). Kasus tersebut menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap PDB negara pada tingkat mikro, hal ini merupakan isu yang kontroversial dan mengkhawatirkan bagi otoritas pemungutan pajak (Aumeerun et al., 2016).

*Tax evasion* memang merupakan masalah yang muncul di negara maju ataupun negara berkembang yang harus dihadapi oleh otoritas pajak (Widuri et al., 2023). Penerapan *tax evasion* menjadi lumrah untuk dilakukan mengingat tidak sedikit tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, seperti sistem perpajakan yang dinilai tidak sistematis, anggaran pajak yang disalahgunakan untuk keinginan sekelompok ataupun perseorangan, dan adanya anggapan bahwa peraturan pajak tidak adil karena menguntungkan satu pihak meskipun merugikan pihak yang lain (Mujiyati, 2017). Hal itu yang menjadi terjadinya *tax evasion* karena asumsi baban pajak yang dibayarkan tidak dikelola dengan baik (Mila et al., 2016).

*Tax evasion* dapat terjadi karena beberapa hal yang merupakan faktor penyebabnya, diantaranya sistem perpajakan, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak, kesadaran dan moralitas wajib pajak, serta sanksi dan penegakan hukum (Kholis & Kurniawati, 2022). Dari faktor-faktor di atas beberapa di antaranya termasuk dalam kekuasaan otoritas pajak antara lain sanksi sebagai kekuasaan koersif dari otoritas pajak dan kualitas pelayanan pajak dan sistem perpajakan sebagai kekuasaan legitimasi otoritas pajak.

Kekuasaan koersif dan kekuasaan legitimasi otoritas pajak adalah dua faktor yang dapat mempengaruhi perilaku *tax evasion* (Mangoting et al., 2020). Kekuasaan koersif dan kekuasaan legitimasi adalah dua jenis kekuasaan yang dapat digunakan otoritas pajak untuk menegakkan kepatuhan wajib pajak. Kekuasaan koersif berarti menggunakan ancaman atau paksaan untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak, seperti memberikan sanksi, denda, atau pemeriksaan. Kekuasaan legitimasi berarti menggunakan kewenangan atau kepercayaan yang dimiliki oleh otoritas pajak untuk meyakinkan wajib pajak supaya bekerja sama, seperti memberikan pelayanan, fasilitas, atau edukasi.

Faktor lainnya penyebab terjadinya *tax evasion* yang bisa mempengaruhi kekuasaan otoritas pajak ialah moral pajak. Moral pajak pada wajib pajak berdampak signifikan pada persepsi dan perilaku wajib pajak terhadap otoritas pajak, serta tingkat kepatuhan pajak, baik yang dipaksakan maupun yang sukarela. Moral pajak dapat berinteraksi dengan faktor-faktor seperti kepercayaan, keadilan, dan sistem perpajakan dalam memengaruhi *tax evasion* (Widuri et al., 2023).

Peneliti menggunakan penelitian Retnaningtyas Widuri sebagai acuan dari jurnal terdahulu tentang kekuasaan otoritas pajak dalam mencegah *tax evasion.* Moral pajak juga digunakan sebagai faktor moderasi dalam jurnal tersebut. Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya karena keduanya melakukannya di tempat yang berbeda dan menggunakan sampel yang berbeda. Jurnal sebelumnya di Surabaya menggunakan sampel wajib pajak orang pribadi, tetapi penelitian ini menggunakan wajib pajak orang pribadi pada pasar di Kota Tegal sebagai sampel. Selain jurnal Retnaningtyas Widuri, tidak ada jurnal yang membahas kekuasaan otoritas pajak untuk mencegah *tax evasion*, jurnal lain hanya membahas pengaruh kekuasaan otoritas pajak pada tingkat kepatuhan pajak. Peneliti tertarik melanjutkan penelitian dengan mengubah kriteria sampel, lokasi, dan tahun penelitian, dengan harapan dapat menambah riset yang relevan.

Dengan dasar latar belakang di atas, penulis mempunyai ketertarikan mengkaji terkait “Pengaruh Kekuasaan Otoritas Pajak dan Moral Pajak Terhadap *Tax Evasion*”

1. **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diajukan pada riset berikut meliputi:

1. Apakah pengaruh kekuasaan koersif otoritas pajak terhadap *tax evasion*?
2. Apakah pengaruh kekuasaan legitimasi otoritas pajak terhadap *tax evasion*?
3. Apakah pengaruh moral pajak terhadap *tax evasion*?
4. Apakah pengaruh moral pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kekuasaan otoritas pajak terhadap *tax evasion*?
5. **Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan permasalahan di atas, tujuan riset berikut meliputi:

1. Memahami pengaruh kekuasaan koersif otoritas pajak terhadap *tax evasion*.
2. Memahami pengaruh kekuasaan legitimasi otoritas pajak terhadap *tax evasion.*
3. Memahami pengaruh moral pajak terhadap *tax evasion.*
4. Menguji apakah moral pajak dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kekuasaan otoritas pajak terhadap *tax evasion*.
5. **Manfaat Penelitian**

Manfaat riset secara praktis dan teoritis meliputi:

1. Manfaat secara teoritis
   1. Bagi universitas
2. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas universitas sebagai lembaga pendidikan
3. Mendorong kerja sama dan kolaborasi antara universitas dengan pihak-pihak lain, seperti otoritas pajak, wajib pajak, peneliti, dan media, dalam hal penelitian dan publikasi ilmiah.
4. Menyediakan sumber daya dan fasilitas yang mendukung kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah, seperti perpustakaan, laboratorium, jurnal, dan seminar.
   1. Bagi peneliti
5. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi peneliti sebagai akademisi dan praktisi yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang mendalam dan luas di bidang pajak.
6. Memberikan kesempatan dan tantangan kepada peneliti berikutnya untuk melakukan studi yang lebih mendalam dan luas, dengan menggunakan pendekatan, variabel, atau metode yang berbeda atau baru.
7. Manfaat secara praktis
   1. Bagi otoritas pajak

Riset berikut bisa menjadi sumber ide dan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan otoritas pajak, serta menumbuhkan kepercayaan dan keterlibatan wajib pajak.

* 1. Bagi pembaca

Riset berikut bisa memberi informasi dan pembelajaran yang berguna untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam membayar pajak, serta mengurangi risiko dan sanksi akibat *tax evasion.*

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Landasan Teori**
2. **Teori Atribusi**

Berdasarkan Maghfiroh & Diana Fajarwati (2016), teori atribusi memerinci bagaimana seseorang berusaha menganalisis dan menilai penyebab suatu kejadian sesuai dengan perspektif individu. Beberapa prinsip yang terkandung dalam teori atribut dapat membantu dalam merumuskan hipotesis tentang *tax evasion*. Tingginya kebutuhan wajib pajak dapat dianggap sebagai kondisi situasional yang berkontribusi terhadap (membenarkan) keputusan untuk melakukan *tax evasion*.

Menurut Yona Yulia (2021), saat seseorang mengkaji perilaku seorang lainnya, orang tersebut berusaha memastikan apakah perilaku itu diakibatkan oleh aspek eksternal atau internal. Oleh karena itu, dalam berperilaku, individu akan termotivasi oleh pemahaman mereka tentang penyebab dari suatu peristiwa atau lingkungan di mana mereka berada (Sulistianingtyas, 2018).

Faktor internal yang mendasari kepatuhan pajak bersumber dari dalam diri wajib pajak, meliputi keyakinan mereka terhadap pajak, kepribadian, kesadaran, dan keterampilan (Yuliyanah et al., 2019). Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh adanya tekanan yang dialami wajib pajak dari pihak luar. Salah satu faktor eksternal yang mendorong kepatuhan pajak adalah adanya penegakan hukum berupa sanksi (Supriyadi, 2014).

Secara umum teori atribusi terdiri dari dua jenis yaitu atribusi disposisi mengasumsikan bahwa perilaku seseorang disebabkan oleh sifat diri atau unsur psikologis, sedangkan atribusi eksternal mengindikasikan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh situasi dimana orang tersebut berada (Meinarno & Wirawan, 2018).

Dalam konteks perpajakan, teori atribusi juga dapat terkait dengan usaha memahami faktor-faktor yang menyebabkan *tax evasion* dari para wajib pajak, seperti mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi tindakan *tax evasion* (Kaplan et al., 1988).

1. ***Theory Slippery Slope***

Sebuah teori yang dikelnal sebagai *slippery slope* dikemukakan (Kirchler et al., 2008), menyajikan kerangka kerja *slippery slope* yang menunjukkan bahwasanya kepercayaan pada otoritas pajak dan keyakinan akan kemampuan untuk mengawasi dan mencegah *tax evasion* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dimungkinkan untuk mengurangi tingkat ketidakpatuhan pajak melalui kombinasi penerapan hukum dan kepercayaan pada otoritas pajak (Khasanah et al., 2019).

Kekuasaan legitimasi dan kekuasaan koersif adalah dua bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas pajak untuk mengurangi ketidakpatuhan pajak. Kekuatan koersif digunakan untuk mengontrol perilaku tidak patuh dengan memberikan tekanan melalui imbauan berkelanjutan, tindakan pemeriksaan, serta penerapan sanksi dan denda (Mangoting et al., 2020). Sementara itu, kekuatan legitimasi pada konsep *slippery slope* berfokus pada bagaimana wajib pajak bersedia mengakui dan menerima otoritas dan keputusan otoritas pajak.

1. ***Theory of Planned Behavior***

*Theory of Planned Behavior* membantu memaparkan bagaimana perilaku dan niat saling terkait (Ajzen, 1991). Sikap, kontrol perilaku dan norma subjektif merupakan faktor penentu niat seseorang guna menjalankan suatu perbuatan. Keinginan dan tekad seseorang untuk melakukan suatu tindakan disebut niat. Niat berhubungan dengan dorongan yang terdapat pada diri individu, baik secara sadar ataupun tidak sadar, guna menjalankan suatu perbuatan dengan suatu tujuan (Oktaviani, 2015). Kemauan untuk melakukan suatu niat dipengaruhi oleh sikap, norma yang dirasakan secara pribadi, dan pengendalian perilaku yang dirasakan. Ketiga faktor ini saling berhubungan untuk menentukan apakah seseorang akan melakukan suatu tindakan atau tidak.

Ajzen & Fishbein (2005) mengungkapkan semakin positif sikap individu pada norma subjektif, perilaku serta kendali atas perilaku yang dipercayai, semakin kuat keinginan untuk melakukan perilaku tertentu. Dalam konteks kepatuhan pajak, kendali perilaku yang dirasakan berpedoman terhadap kecakapan dan kontrol wajib pajak untuk *tax evasion*, norma subyektif berpedoman terhadap ekspektasi orang lain atau tekanan sosial tentang pembayaran pajak, dan sikap mengacu pada penilaian wajib pajak terhadap manfaat dan kerugian dari membayar pajak(Mahendra & Oktaviani, 2022).

Keputusan wajib pajak untuk patuh ataupun tidak terhadap pajak dijelaskan melalui *theory of planned behavior* yang menghubungkannya dengan moral pajak. Moral ialah evaluasi yang terbentuk dari dalam diri seorang individu secara natural (Anugrah & Fitriandi, 2022).

1. ***Tax Evasion***

Rosianti (2014) mendefinisikan bahwa *tax evasion* sebagai tindakan wajib pajak yang dilakukan dengan cara sengaja melanggar peraturan perundang-undangan agar dapat meringankan beban pajak. Wajib pajak melakukan tindakan yang bertentangan dari ketentuan perpajakan formal berupa pemalsuan dokumen ataupun mengisi data yang tidak benar dan tidak lengkap. Ika Puji Saputri (2021) mengatakan bahwa *tax evasion* dapat terjadi akibat wajib pajak lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti:

1. Ketidakpatuhan (*ignorance*): ketidaktahuan wajib pajak pada kebijakan perpajakan sebagai satu diantara faktor yang mendasari.
2. Kesalahan perhitungan (*error*): ketidaktahuan wajib pajak dalam menghitung data namun memahami undang-undang perpajakan.
3. Kesalahpahaman (*misunderstanding*): kesalahan penafsiran undang-undang perpajakan oleh wajib pajak.
4. Kealpaan (*negliance*): kelalaian wajib pajak dalam menyimpan buku dan bukti-bukti secara lengkap.

Perlawanan terhadap pajak dibagi menjadi dua kategori, perlawanan pasif yang timbul dari faktor eksternal seperti struktur ekonomi dan perkembangan moral, dan perlawanan aktif yang melibatkan upaya wajib pajak dalam menghindari atau mengurangi beban pajak melalui penghindaran, penggelapan, kelalaian, dan pelimpahan pajak (Ayu & Hastuti, 2009).

Dalam membentuk sikap seseorang terhadap praktik *tax evasion*, persepsi dan sikap wajib pajak dipengaruhi secara bergantian oleh persepsi individu. Kenaikan pajak pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan negara, namun dapat menimbulkan *tax evasion* oleh wajib pajak (Permatasari & Laksito, 2013). Wajib pajak yang meyakini bahwa kemungkinan terungkapnya kecurangan pajak melalui pemeriksaan rendah, berpotensi tinggi untuk menjalankan *tax* evasion, hingga wajib pajak akan menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang dapat diterima (Ayu & Hastuti, 2009).

1. **Kekuasaan Koersif**

Kekuasaan koersif pajak merupakan kekuasaan yang dipunyai oleh otoritas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan ancaman sanksi atau hukuman (Mangoting et al., 2020). Menurut Kirchler et al. (2008), otorisasi koersif sebagai otorisasi yang dikendalikan oleh otoritas pajak guna memaksa wajib pajak guna mematuhi peraturan perpajakan. Kekuasaan koersif pajak dapat berupa pemeriksaan, penagihan, penyitaan, penjara, atau denda. Kekuasaan koersif pajak bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan menghindari perilaku *tax evasion*, yang merupakan bentuk ketidakpatuhan pajak.

Otoritas pajak sebagai pihak yang memiliki kekuasaan koersif dapat melakukan tindakan seperti melakukan pemeriksaan, audit, atau upaya penegakan hukum pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dicurigai melakukan pelanggaran; memberikan sanksi administratif atau pidana jika wajib pajak terbukti menjalankan *tax evasion*; memberikan insentif dan fasilitas pajak sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang patuh; dan menggunakan sistem *self-assessment* yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajak sendiri (Mangoting et al., 2020).

Hal ini menunjukkan kekuatan koersif terbukti dapat mempengaruhi *tax evasion*, namun dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak masih belum konsisten. Temuan ini menyoroti hubungan kompleks antara kekuasaan koersif dan kepatuhan pajak.

Otoritas pajak harus fokus tidak hanya pada tindakan koersif tetapi juga pada membangun kepercayaan, memberikan informasi yang komprehensif, dan membina kerja sama sukarela untuk mengamankan pendapatan pajak dan menciptakan iklim masyarakat yang baik dan hubungan saling menghormati. Oleh karena itu, meskipun kekuasaan koersif merupakan alat bagi otoritas pajak, kekuasaan tersebut harus dilengkapi dengan kekuasaan yang sah dan strategi tata kelola yang baik agar dapat secara efektif mencegah *tax evasion* (Hofmann et al., 2014).

Pemeriksaan pajak merupakan faktor pencegah yang merupakan bagian dari otorisasi koersif. Daya paksa yang negatif mengindikasikan adanya ketidakpercayaan otoritas terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak perlu diperiksa (Gangl et al., 2015). Khasanah et al. (2019) berpendapat kekuasaan koersif pajak juga dapat menimbulkan efek negatif, seperti ketidakpercayaan, permusuhan, atau perlawanan pada otoritas pajak. Sehingga, kekuasaan koersif pajak harus digunakan secara bijaksana dan proporsional, dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang berdampak pada kepatuhan pajak, sebagaimana keadilan, kesejahteraan, serta komitmen (Mangoting et al., 2020).

1. **Kekuasaan Legitimasi**

Kekuasaan Legitimasi menurut Robbins (2004) yaitu kekuasaan merepresentasikan wewenang formal guna memanfaatkan dan mengontrol sumber daya organisasi. Ramadhan & Rodoni (2021) mengatakan kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang didasarkan pada pengakuan dan penerimaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sebagai lembaga yang bertindak untuk mengatur dan mengawasi urusan perpajakan. Kekuasaan legitimasi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela, tanpa perlu mengandalkan kekuasaan paksaan atau sanksi (Hakim et al., 2017).

Menurut *political legitimacy theory*, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat pada pemerintah (Kirchler et al., 2008). Kepercayaan ini mencakup keyakinan pada petugas pajak, lembaga pajak, atau pihak-pihak terkait lainnya (Latief & Zakaria, 2020).

Kekuasaan legitimasi pajak memiliki peran yang lebih efektif dalam memperkuat kepatuhan pajak daripada kekuasaan koersif. Hal tersebut diakibatkan oleh persepsi bahwa kekuasaan legitimasi pajak lebih bersifat ramah dan mampu menciptakan iklim kerjasama yang meyakinkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara sukarela.

Sebagai pihak yang memegang kekuasaan legitimasi, otoritas pajak berperan dalam memberi layanan yang baik, transparan, dan adil pada wajib pajak; melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan kepada wajib pajak; melibatkan wajib pajak dalam proses pembuatan kebijakan perpajakan; serta mengalokasikan pendapatan pajak untuk kesejahteraan rakyat (Mangoting et al., 2020 dan Basri, 2013).

Osipov (2018) menegaskan bahwa kekuatan legitimasi tidak memiliki kemampuan untuk memengaruhi melalui kewenangan dan otoritas semata. Walaupun kekuatan legitimasi dinilai bisa menghasilkan kepatuhan pajak secara sukarela, namun tetap bergantung pada keyakinan wajib pajak lantaran didasarkan pada persepsi. Mohamad et al. (2017) mengemukakan bahwasanya legitimasi harus memperhatikan aspek keadilan pada kewajiban dan hak wajib pajak.

1. **Moral Pajak**

Nugroho (2021) menjelaskan moral pajak sebagai motivasi internal individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Parengkuan (2021) menggambarkan moral pajak sebagai faktor penentu yang menjelaskan alasan mengapa orang memilih untuk bersikap jujur dalam hal perpajakan. Dalam konteks perpajakan, moral pajak melibatkan keyakinan individu tentang keadilan, tanggung jawab, dan etika terkait membayar pajak. Setiawan (2021) Moral pajak memiliki aspek-aspek diantaranya, pajak secara sukarela, transparasi dalam pelaporan, mengerti manfaat pajak, berpartisipasi dalam gerakan moral, mengetahui pengaruh pajak terhadap pembangunan nasional, menghormati hukum dan etika yang ada.

Moralitas mencerminkan pandangan seseorang tentang prinsip benar dan salah. Moral pajak menunjukkan keinginan warga negara guna membayarkan pajak tanpa menggantungkan aturan hukum (Daude et al., 2013). Dalam hal ini, keinginan merujuk pada dorongan internal (motivasi intrinsik) individu, bukan dipengaruhi oleh aspek eksternal, dan menekankan sikap seseorang terhadap pembayaran pajak sebagai kewajiban moral, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi (Torgler & Schneider, 2004). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai motivasi intrinsik yang kuat dalam membayarkan pajak cenderung mempunyai niat yang lebih rendah melakukan kecurangan pajak.

Bila seorang individu sadar bahwasanya jumlah pajak yang mereka bayarkan lebih besar dari manfaat publik yang mereka terima dari pemerintah, namun tetap memenuhi kewajiban pajak mereka tanpa mempertimbangkan ketidakadilan yang dirasakan, ini memaparkan adanya moral pajak (Daude et al., 2013). Individu dengan moral pajak yang tinggi akan membayar pajaknya tanpa mempermasalahkan alasannya. Mereka memiliki prinsip moral yang kuat yang mendorong mereka untuk mematuhi aturan, sehingga tidak cenderung melakukan perilaku yang menyimpang.

Owusu (2022) menyimpulkan bahwasanya moral pajak mempunyai dampak negatif yang signifikan pada kecenderungan menjalankan *tax evasion*. Ini bermakna bahwasanya makin tinggi moral pajak seorang individu, semakin rendah kecenderungan menjalankan penggelapan pajak. Penelitian oleh (Parwati et al., 2021) menegaskan bahwa moral pajak mempengaruhi keputusan untuk melakukan *tax evasion*.

1. **Penelitian Terdahulu**

Referensi riset berikut mencakup sejumlah riset sebelumnya, seperti:

1. Tabbach (2007) *Crime, Punishment, And Tax.*

Penelitian ini membahas bahwa hukum antara kekuasaaan koersif atas *tax evasion* melalui sanksi dan pemeriksaan pajak tidak lagi efektif untuk mencegah *tax evasion* dan bahkan dapat mengurangi kepatuhan pajak secara sukarela.

1. Hofmann (2014) *Enhancing Tax Compliance through Coercive And Legitimate Power of Tax Authorities by Concurrently Diminishing or Facilitating Trust In Tax Authorities*

Hasil penelitian menemukan kekuasaan koersif otoritas pajak yang rendah dan tingginya kekuasaan legitimasi lemah terhadap *tax evasion* dan kompeten. Otoritas pajak yang mempunyai tingkat kekuasaan koersif yang tinggi serta kekuasaan legitimasi yang rendah sangat berpengaruh terhadap *tax evasion* dan tidak kompeten. Sedangkan kekuasaan koersif dan kekuasaan legitimasi otoritas pajak yang rendah lemah terhadap *tax evasion* dan tidak kompeten. Terakhir, otoritas pajak yang mempunyai kekuasaan koersif tinggi dan kekuasaan legitimasi tinggi berpengaruh terhadap *tax evasion* dan kompeten.

1. Gangl (2015) *Tax Authorities’ Interaction With Taxpayers: A Conception Of Compliance In Social Dilemmas By Power And Trust*

Penelitian ini menemukan bahwa di Negara Eropa bagian utara wajib pajak menganggap kekuasaan koersif yang rendah dan kekuasaan legitimasi yang rendah dengan sengaja melakukan *tax evasion* karena menganggap kekuasaan legitimasinya rendah dan tidak mematuhinya karena undang-undang dan peraturan perpajakan yang sulit dipahami.

1. Maghfiroh & Diana Fajarwati (2016) Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Studi ini melibatkan 110 responden dari populasi wajib pajak UMKM, dengan metode penentuan sampel *non-probabilitas* memakai *purposive sampling.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan legitimasi dan kekuasaan koersif otoritas pajak memiliki dampak negatif terhadap perilaku *tax evasion*.

1. Khasanah (2019) *Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope*

Hasil penelitian ini menunjukkan dampak kepercayaan pajak dalam teori *slippery slope*, yang sejalan dengan argumen Kirchler (2008) yang menegaskan bahwa kepercayaan sangat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak secara sukarela, serta menyoroti dimensi interaksi antara otoritas pajak dan tingkat kepercayaan terhadapnya. Meskipun otoritas pajak menggunakan kekuatan koersif, beberapa wajib pajak masih terlibat dalam *tax evasion*.

1. Parwati (2021) *The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of Tri Hita Karana and tax framing*

Hasil riset berikut memaparkan bahwasanya wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi dalam tinggi dalam perspektif Tri Hita Karana (THK) akan lebih rendah melakukan *tax evasion* dibanding dengan wajib pajak yang mempunyai moral pajak yang rendah. Selain itu, hasil riset juga memaparkan bahwasanya wajib pajak yang mempunyai moral pajak yang tinggi menerapkan Dharma THK dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Johanna & Ratih Suklimah (2022) Pengaruh *Money Ethics, Religiusitas, Tax Morale*, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax Evasion*

Riset berikut mengambil sampel dari WPOP (Wajib Pajak Orang Pribadi) yang merupakan warga negara Indonesia dan berdomisili di Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari. Sampel terdiri dari 100 responden yang terlibat dalam pekerjaan atau usaha. Hasil riset memaparkan bahwasanya etika uang dan moral pajak memiliki dampak signifikan dan negatif pada perspektif terhadap *tax evasion*, sementara persepsi keadilan pajak dan religiusitas tidak memiliki dampak signifikan.

1. Savira (2023) Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak

Jurnal ini menguji dampak sanksi pajak, sistem perpajakan, serta tarif pajak pada pandangan etis terhadap penghindaran pajak melalui efektivitas penerimaan pajak. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak, sistem perpajakan, serta tarif pajak tidak memengaruhi persepsi etis terhadap penghindaran pajak.

1. Widuri (2023) *Preventing Tax Evasion: The Moral Strength of Taxpayers and The Power of Tax Authorities*.

Riset berikut memakai subyek wajib pajak yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dengan hasil riset memaparkan bahwasanya kekuasaan koersif memiliki dampak positif terhadap *tax evasion*, sedangkan kekuasaan legitimasi tidak memiliki dampak terhadap *tax evasion*, dan moral pajak memiliki dampak negatif terhadap *tax evasion*

1. Hananto (2023) Pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion Intention* di Surabaya dengan Kepribadian *Conscientiousness & Agreeableness* sebagai Moderasi

Sampel dari riset berikut ialah mahasiswa aktif Sarjana yang belum berpendapatan pada perguruan tinggi di Kota Surabaya dengan hasil riset memaparkan bahwasanya moral pajak berdampak signifikan dan negatif pada niat *tax evasion*. Dalam hubungan antara moral pajak dan keinginan *tax evasion*, kehati-hatian bukanlah variabel moderasi. Pada taraf kepercayaan 90%, kehati-hatian melemahkan dampak negatif moral pajak pada keinginan *tax evasion*.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti dan Tahun** | **Judul Penelitian** | **Jenis Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | (Tabbach, 2007) | *Crime, Punishment, And Tax.* | Kualitatif | Kekuasaaan koersif tidak dapat mencegah *tax evasion* |
| 2 | (Hofmann et al., 2014) | *Enhancing Tax Compliance through Coercive And Legitimate Power of Tax Authorities by Concurrently Diminishing or Facilitating Trust In Tax Authorities* | Kualitatif | Penelitian ini menemukan bahwa kekuasaan koersif yang rendah dan kekuasaan legitimasi yang tinggi berhubungan dengan *tax evasion* dan kompetensi. Otoritas pajak yang memiliki kekuasaan koersif tinggi dan kekuasaan legitimasi rendah cenderung mempengaruhi *tax evasion* dan ketidak kompetenan |
| 3 | (Gangl et al., 2015) | *Tax Authorities’ Interaction With Taxpayers: A Conception Of Compliance In Social Dilemmas By Power And Trust* | Kualitatif | Kekuasaan koersif yang rendah dan kekuasaan legitimasi yang rendah dengan sengaja melakukan *tax evasion* |
| 4 | (Maghfiroh & Diana Fajarwati, 2016) | Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak | Kuantitatif | Perspektif wajib pajak perihal keadilan tidak berdampak negatif sementara sanksi pajak dan sistem perpajakan berdampak negatif pada *tax evasion* |
| 5 | (Khasanah et al., 2019) | *Coercive Authority and Trust in Tax Authority in Influencing Voluntary Tax Compliance: A Study of Slippery Slope.* | Kualitatif | Kekuasan koersif yang diterapkan otoritas pajak tidak dapat mencegah *tax evasion* |
| 6 | (Parwati et al., 2021) | *The effect of tax morale on tax evasion in the perspective of* Tri Hita Karana *and tax framing* | Kualitatif | Moral pajak yang tingggi cenderung mengurangi *tax evasion* |
| 7 | (Johanna & Ratih Suklimah, 2022) | Pengaruh *Money Ethics, Religiusitas, Tax Morale,* Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai *Tax* *Evasion* | Kualitatif | Moral pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi mengenai *tax evasion* |
| 8 | (Savira, 2023) | Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etis Atas Penghindaran Pajak | Kuantitatif | Sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak tidak berdampak pada persepsi wajib pajak perihal etika atas *tax evasion* |
| 9 | (Widuri et al., 2023) | Preventing Tax Evasion: The Moral Strength of Taxpayers and The Power of Tax Authorities | Kuantitatif | Kekuasaan koersif dan moral pajak berpengaruh positif terhadap *tax evision,* dan kekuasaan legitimasi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* |
| 10 | (Hananto et al., 2023) | Pengaruh *Tax Morale* terhadap *Tax Evasion* Intention di Surabaya dengan Kepribadian *Conscientiousness & Agreeableness* sebagai Moderasi | Kualitatif | Moral pajak memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap niat untuk melakukan *tax evasion* |

1. **Kerangka Pikir Konseptual**

Hubungan antar variabel dijelaskan secara singkat seperti berikut:

* 1. Kekuasaan Koersif Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*

Kekuasaan koersif merujuk pada kemampuan lembaga untuk memaksa masyarakat melakukan sesuatu melalui ancaman atau tindakan paksa. Kekuasaan ini dimiliki oleh otoritas pajak memang berperan penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Wajib pajak diharuskan tunduk terhadap hukum karena adanya kekuasaan yang memaksa untuk taat tanpa syarat. Sanksi dan hukuman merupakan dua bentuk kekuasaan koersif yang dapat memengaruhi perilaku wajib pajak.

Sanksi wajib pajak membuat otoritas pajak semakin sulit menemukan transaksi *tax evasion* yang agresif (Tabbech, 2013). Besarnya sanksi yang dibebankan akan mendorong wajib pajak untuk berperilaku tidak patuh, dan semakin banyak celah kesempatan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melakukan *tax evasion* (Ramdani, 2022). Sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas ketidakpatuhan berupa denda atau bunga yang dapat meningkatkan kecurangan wajib pajak (Widuri et al., 2023). Hal ini sejalan dengan penelitian dari Santana el al (2020) yang menjelaskan jika sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap *tax evasion*.

* 1. Kekuasaan Legitimasi Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*

Kekuasaan legitimasi berkaitan dengan otoritas yang diberikan oleh norma, regulasi, dan institusi. Kekuasaan legitimasi berupa keadilan sistem perpajakan dan sistem layanan perpajakan akan membuat wajib pajak percaya jika dengan keabsahan dan keadilan sistem perpajakan tersebut membuat wajib pajak lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak.

Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan *tax evasion*. Dalam penelitian juga menyatakan jika semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan maka *tax evasion* akan semakin rendah.

Kekuasaan legitimasi dianggap lebih bersahabat yang menimbulkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Gangl ed al., 2020). Melalui kekuasaan legitimasi yang dimilikinya dan menganggap wajib pajak sebagai mitra, otoritas pajak juga menawarkan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban sehingga masing-masing pihak dapat saling memberikan manfaat secara timbal balik (Hofmann et al., 2014). Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian dari Ramdani (2022) yang menyatakan jika kekuasaan legitimasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak atas *tax evasion*.

* 1. Moral Pajak Berpengaruh Terhadap *Tax Evasion*

Moral pajak mencakup keyakinan individu tentang keadilan dan tanggung jawab membayar pajak. Konsep moralitas mencakup pandangan yang dimiliki seseorang tentang apa yang benar dan salah. Menurut Daude et al. (2013), moral pajak dimana ketika warga negara termotivasi untuk membayar pajak tanpa mengandalkan kewajiban hukum. Motivasi ini berasal dari dalam diri sendiri, bukan dari sumber eksternal, dan berkaitan dengan sikap individu untuk membayar pajak sebagai kewajiban moral dan bukan karena takut akan sanksi (Torgler & Schneider, 2004).

Maraknya kasus *tax evasion* yang ada membentuk moral pajak yang tidak baik. Sehingga, menjadikan moral pajak sebagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat *tax evasion.* Jika seseorang memiliki moral yang rendah terkait pajak, wajib pajak akan lebih cenderung melakukan *tax evasion*. Beberapa faktor terkadang membuat wajib pajak mengorbankan idealisme moral untuk tidak patuh seperti yang lain jika sistem perpajakan tidak adil dan diskriminatif (Widuri et al., 2023).

Penelitian dari Parwati (2021) menunjukkan bahwa moral pajak memberikan pengaruh positif pada *tax evasion.* Moral pajak tidak mengevaluasi tindakan seseorang, tetapi lebih mengevaluasi sikap dan prinsip wajib pajak. Wajib pajak melakukan penolakan terhadap moral atau rasa dalam diri individu yang tidak nyaman dan membenarkan atas tindakan tidak baik dalam memenuhi pajaknya (Fajarwati, 2023).

* 1. Moral Pajak Sebagai Variabel Moderasi Dalam Hubungan Kekuasaan Otoritas Pajak Terhadap *Tax Evasion*

Moral pajak berperan dalam hubungan antara kekuasaan koersif/legitimasi otoritas pajak terhadap *tax evasion*. Moral yang ada menjadikan tolak ukur untuk menentukan apakah sikap dan tindakan individu sudah benar dalam mengambil peran. Menurut penelitian Torgler (2013), moral terkait dengan perilaku yang baik dan buruk seseorang. Standar moral yang ada di lingkungan seseorang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan peran yang dimainkan.

Penelitian ini menyelidiki peran moral dalam hubungannya dengan kekuatan koersif dan legitimasi otoritas pajak terhadap tax evasion karena kekuatan otoritas tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara koersif dan legitimasi tanpa adanya kepercayaan dari wajib pajak. Penelitian terdahulu oleh Widuri (2023) menjelaskan jika moral pajak berpengaruh melemahkan kekuasaan koersif terhadap *tax* *evasion* dan memperkuat kekuasaan legitimasi terhadap *tax evasion.*

Kekuasaan koersif merupakan faktor yang dianggap dapat memberikan tekanan dan rasa takut bagi individu sehingga menjadi alat yang efektif dalam mengendalikan kepatuhan. Meskipun disadari bahwa daya paksa yang berlebihan dapat menimbulkan resistensi dari individu atau anggota kelompok sehingga mereka resisten untuk melakukan tugas yang diberikan. Dalam perpajakan, kekuatan koersif relevan dengan paksaan yang dapat mempengaruhi psikologi wajib pajak karena menimbulkan rasa takut dan iklim yang antagonis, sehingga berdampak pada kepatuhan pajak.

Daya paksa cenderung ditolak karena wajib pajak, terutama wajib pajak yang patuh, tidak menyukainya. Namun, di sisi lain, wajib pajak juga tidak akan patuh dan mau bekerja sama secara sukarela tanpa adanya penegakan hukum yang memadai. Wajib pajak mengharapkan pemerintah bersikap tegas dalam menerapkan penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, faktor moral dalam penelitian ini dapat menggerakkan motivasi intrinsik wajib pajak untuk tidak melakukan *tax evasion* meskipun kekuasaan oroitas pajak dianggap cukup.

Kekuasaan Koersif

H4a

H1

H31

Moral Pajak

*Tax Evision*

H2

H4b

Kekuasaan Legitimasi

Gambar 2.1

Kerangka Pikir

1. **Hipotesis**

Menurut *The American Heritage Dictionary,* hipotesis adalah pernyataan yang bersifat sementara dan belum terbukti, yang diajukan sebagai penjelasan atas fenomena alam atau hubungan antar variabel. Hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban yang didasarkan pada teori atau fakta yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Hipotesis harus dapat diuji secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah. Penulis membuat hipotesis berikut berdasarkan kerangka pemikiran di atas:

H1 : Kekuasaan koersif berpengaruh positif terhadap *tax evasion*

H2 : Kekuasaan legitimasi berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*

H3 : Moral pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*

H4a : Moral pajak berpengaruh dalam melemahkan hubungan kekuasaan koersif terhadap *tax evasion*

H4b : Moral pajak berpengaruh dalam memperkuat hubungan kekuasaan legitimasi terhadap *tax evasion*

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Riset berikut memakai model studi kuantitatif dengan metode survei dengan teknik purposive sampling berstrata untuk menjadikan profesi guru SMPN yang ada di Kota Tegal sebagai sampel. Tujuan penelitian ini untuk meneliti dampak kekuasaan koersif dan legitimasi otoritas pajak terhadap *tax evasion*, serta peran dari moral wajib pajak sebagai variabel moderasi. Analisis data dan uji hipotesis dalam riset dijalankan menggunakan SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*).

1. **Populasi Dan Sampel**
2. Populasi

Handayani (2020) mengartikan populasi sebagai kumpulan elemen pada sebuah riset yang akan dianalisis, yang memiliki kesamaan ciri, seperti sekelompok individu, kejadian, atau objek yang akan diteliti. Seperti penjelasan di atas, populasi yang digunakan adalah profesi guru khususnya guru SMP Negeri yang ada di kota Tegal sesuai dari data yang diperoleh sebanyak 18 sekolah.

1. Sampel

Djarwanto (1994) mengartikan sampel sebagai bagian dari keseluruhan populasi yang ciri khasnya akan dikaji. Sampel yang baik dimana sampel dapat menunjukkan atau menggambarkan karakteristik populasi dan kesimpulan dari sampel ini dapat diterapkan pada populasi. Penelitian ini melibatkan keseluruhan populasi sebagai sampel, sehingga tiap bagian dari populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih. Ini termasuk bagian dari metode pengambilan sampel tidak acak atau *non probability sampling*. Teknik ini umumnya dilakukan pada populasi yang kecil, homogen, dan mudah diakses.

Sugiyono merekomendasikan sampel yang sesuai dalam penelitian berjumlah kisaran 30 hingga 500 sampel. Pada riset berikut, total sampel yang dipakai ialah 100, dengan 25 wajib pajak orang pribadi di setiap kecamatan yang ada di Kota Tegal. Jumlah sampel ini dianggap representatif untuk mendapatkan data penelitian yang mewakili keadaan populasi.

Tabel 3.1

Sampel Penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Sampel |
| 1. | Margadana | 25 |
| 2. | Tegal Barat | 25 |
| 3. | Tegal Selatan | 25 |
| 4. | Tegal Timur | 25 |
|  | Jumlah keseluruhan | 100 |

Sumber: Wikipedia

1. **Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel**
2. Definisi Konseptual

Variabel merujuk pada berbagai bentuk yang peneliti tetapkan untuk dipelajari, dengan tujuan mendapatkan informasi yang nantinya akan diambil kesimpulannya. Pemilihan variabel yang optimal melibatkan dasar teoritis, penguatan hipotesis, dan ketergantungan pada kompleksitas desain penelitian. Oleh karena itu, dalam memilih variabel penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan variasi dalam hal kepemilikan oleh individu, objek, bidang kegiatan, atau keilmuan tertentu, yang pada akhirnya memerlukan variasi dalam sumber data atau objek penelitian. Variabel dibagi menjadi lima macam antara lain: variabel pendahulu, variabel independent (bebas), variabel dependent (terikat), variabel moderasi (moderator), variabel kontrol dan variabel intervening. Dalam riset berikut memakai tiga dari lima variabel di atas, antara lain variabel moderasi (moderator), variabel independent, dependent dengan pemaparan untuk setiap variabel meliputi:

1. Variabel independen (variabel bebas)

Variabel independen yang sering dikenal sebagai variabel bebas merupakan suatu faktor atau nilai yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi perubahan atau timbulnya variabel dependen. Tritjahjo Danny Soesilo menjelaskan bahwa variabel independen dapat menjadi faktor memicu atau berpotensi dalam memengaruhi variabel lain. Secara umum, variabel independen dilambangkan dengan huruf X dan muncul terlebih dahulu sebelum variabel lainnya.

1. Kekuasaan koersif otoritas pajak (X1)

Kekuasaan koersif otoritas pajak merujuk pada kewenangan otoritas pajak untuk memaksa dan memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Hal ini mencakup penggunaan tekanan hukuman, probabilitas pemeriksaan pajak, dan pengenaan sanksi. Kekuasaan koersif ini dapat memengaruhi *tax evasion*.

1. Kekuasaan legitimasi otoritas pajak (X2)

Kekuasaan legitimasi otoritas pajak merujuk pada konsep yang menggambarkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak. Makin rendah taraf kepercayaan publik kepada otoritas pajak, maka kekuasaan legitimasi akan menjadi tidak efektif dan mempengaruhi *tax evasion.*

1. Variabel dependen (variabel terikat)

Faktor yang terpengaruh atau hasil dari variabel independent diartikan variabel dependent. Variabel ini adalah variabel terikat, dan besarnya bergantung pada besarnya variabel independent. Secara umum, variabel dependent dilambangkan dengan huruf Y. Peluang bahwa variabel dependen akan berubah sebesar koefisien perubahan disesuaikan dengan perubahan variabel independen. Dengan kata lain, setiap perubahan satuan dalam variabel independen diharapkan dapat menimbulkan perubahan yang sebanding dalam variabel dependen, baik peningkatan maupun penurunan.

1. *Tax evasion* (Y)

Mughal (2012) mendeskripsikan *tax evasion* menjadi perbuatan wajib pajak dimana wajib pajak dengan sengaja atau tidak patuh menjalankan pelanggaran pada UU dengan maksud menghindari pembayaran pajak yang wajib dibayarkan wajib pajak.

1. Variabel Moderasi (Moderator)

Variabel moderasi atau yang juga dikenal sebagai variabel moderator merupakan faktor pengubah yang memengaruhi kekuatan korelasi diantara variabel independent dan dependent. Faktor berikut bisa memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Variabel berikut diartikan menjadi variabel independent kedua. Ketika melakukan analisis statistik dengan satu variabel independent dan satu atau lebih variabel independent, ada kemungkinan bahwa aspek-aspek lain yang tidak tergolong pada model dapat memiliki pengaruh. Variabel moderasi bertujuan untuk menguatkan atau melemahkan keterkaitan antara variabel independen dan dependen. Kehadirannya membantu memahami bagaimana variabel independen dan dependen berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana interaksi tersebut dapat diubah oleh variabel moderasi.

1. Moral Pajak (Z)

Moral pajak merupakan sikap dan prinsip yang dimiliki oleh wajib pajak terkait dengan kewajiban membayar pajak (Ima Nur Sliyah, 2020). Moral pajak dapat mempengaruhi intensi penggelapan pajak, yaitu keinginan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak secara ilegal.

1. Operasionalisasi Variabel

Riset membutuhkan operasionalisasi variabel guna menetapkan parameter dan jenis variabel yang hendak dipakai. Istilah "operasionalisasi variabel" mengacu pada konsep abstrak (konstruk) menjadi dimensi dan indikator yang lebih spesifik dan terukur, memungkinkan peneliti untuk menentukan jenis dan alat ukur yang tepat untuk setiap variabel (Indriantoro & Supomo, 2002:69). Peneliti mungkin menghadapi tantangan dalam menetapkan hubungan antara variabel yang masih berada pada level konseptual tanpa melakukan operasionalisasi variabel. Langkah-langkah berikut diambil untuk mengoperasionalisasikan variabel tersebut:

Tabel 3.2

Operasional Variabel

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Variabel | Detensi | Indikator | Skala |
|  | Penghindaran | Tidak memaparkan SPT | Interval |
|  | Penggelapan | Memaparkan SPT dengan tidak benar | Interval |
|  |  | Menyalahgunakan peraturan perpajakan | Interval |
| *Tax Evasion* (Y) | Kealpaan | Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan | Interval |
|  | Pelimpahan pajak | Mengalihkan aset atau kegiatan usaha ke negara atau wilayah yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah | Interval |
|  | Kelalaian | Tidak melaporkan atau membayar pajak tepat waktu | Interval |
|  | Pemeriksaan | Melakukan pemeriksaan berupa peninjauan dokumen, catatan keuangan, dan transaksi yang terkait dengan pajak | Interval |
| Kekuasaan Koersif (X1) | Penyitaan | Menyita aset atau properti gagal membayar pajak yang seharusnya dibayarkan | Interval |
|  | Penjara | Pengajuan tuntutan penjara untuk pelanggan yang serius | Interval |
|  | Denda | Pemberian denda jika terlambat membayar | Interval |
|  | Pelayanan | Memberikan pelayanan yang baik, transparan, dan adil | Interval |
| Kekuasaan Legitimasi (X2) | Transparansi | Menerbitkan panduan perpajakan yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh masyarakat | Interval |
|  |  | Menyediakan informasi online tentang hak dan kewajiban wajib pajak, serta perubahan peraturan perpajakan | Interval |
|  | Edukasi dan sosialisasi | Seminar, *workshop*, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh otoritas pajak | Interval |
|  |  | Kampanye edukasi melalui media sosial, brosur, dan acara publik | Interval |
|  | Melibatkan WP dalam pembuatan | Konsultasi publik sebelum mengubah peraturan perpajakan | Interval |
|  | kebijakan | Forum dialog antara pemerintah dan wajib pajak untuk mendengarkan masukan dan saran | Interval |
|  | Memenuhi pajak secara sukarela | Membayar pajak tepat waktu dan melaporkan penghasilan dengan jujur | Interval |
|  | Transparansi dalam pelaporan | Menyampaikan informasi dengan jelas dan tidak menyembunyikan aset atau penghasilan | Interval |
| Moral Pajak (Z) | Sadar manfaat pajak | Menganggap pajak sebagai kontribusi untuk pembangunan infrastruktur dan layanan publik  Pajak digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. | Interval |
|  | Partisipasi dalam gerakan moral | Menandatangani petisi atau mendukung kampanye untuk perubahan kebijakan perpajakan | Interval |
|  | Dampak pajak pada pembangunan nasional | Memiliki kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas negara |  |
|  | Menghormati kewajiban hukum dan etika | Mematuhi aturan perpajakan dengan itikad baik dan menghindari praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat | Interval |

1. **Metode Pengumpulan Data**

Data pada riset berikut diperoleh melalui data primer, yang dimana metode pengumpulan datanya langsung dari sumber pertama seperti responden, objek, atau peristiwa yang dikaji. Metode yang dipakai pada penghimpunan data primer melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan sumber data, seperti melalui observasi, wawancara, kuesioner, atau tes.

1. **Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen Penelitian**

1) Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan menggambarkan karakteristik data dengan menghitung nilai maksimum, minimum, varians, standar deviasi, serta rata-rata dari setiap variabel. Jika rata-rata melebihi standar deviasi, maka distribusi data variabel tersebut dianggap stabil dan kurang bervariasi.

2) Uji Validitas

Validitas memastikan bahwa indikator dalam kuesioner mampu memberikan gambaran yang akurat tentang konsep (konstruk) yang ingin diteliti. Pengujian validitas dijalankan guna menghitung koefisien korelasi diantara indikator dengan konsepnya. Uji signifikansi koefisien korelasi dilakukan pada tingkat 0,05 untuk menentukan apakah hubungan antara indikator dan konsepnya cukup kuat dan signifikan secara statistik. Indikator dikatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

3) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dipakai guna menilai konsistensi dan kepercayaan data yang dihasilkan oleh alat ukur atau kuesioner yang digunakan. Salah satu cara untuk mengukur reliabilitas yaitu dengan menggunakan *Cronbach alpha.* Ini adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik sekelompok item (pertanyaan atau pernyataan) bekerja bersama-sama untuk mengukur konsep yang sama. Rentang skor *Cronbach alpha* berkisar diantara 0 sampai 1. Bila skor *Cronbach alpha* 1, menunjukkan reabilitas yang sempurna. Sedangkan nilai yang melebihi 0,7 dianggap memaparkan keandalan yang baik.

1. **Metode Analisis Data**

Beberapa pengujian yang dijalankan pada riset berikut meliputi:

1. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk untuk memastikan bahwa data memenuhi prasyarat yang diperlukan untuk menjalankan analisis regresi. Beberapa asumsi klasik yang diperiksa meliputi:

1. Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas data dimaksudkan guna menentukan apakah distribusi data bersifat normal atau tidak. Distribusi normal disebut memiliki distribusi yang simetris dan berbentuk lonceng. Uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan alat statistik yang dipakai guna memvalidasi asumsi normalitas pada riset. Uji berikut membandingkan distribusi data dengan distribusi normal teoritis. Bila taraf signifikansi melebihi 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal.

1. Uji Autokorelasi

Nilai residual pada periode sekarang dan nilai residual pada periode sebelumnya dalam model regresi dapat dikaitkan dengan menggunakan uji autokorelasi. Autokorelasi dapat menyebabkan estimasi parameter menjadi bias dan tidak efisien. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW), yang menghasilkan nilai statistik DW dalam rentang 0 hingga 4. Ketika nilai DW mendekati 2, menandakan ketiadaan autokorelasi. Namun, jika nilai DW mendekati 0 atau 4, itu menunjukkan adanya autokorelasi positif atau negatif.

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan agar dapat mengevaluasi apakah variabel independen dalam model rearesi memiliki hubungan yang kuat satu sama lain. Kehadiran multikolinearitas bisa membuat analisis faktor yang mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen menjadi rumit. Dalam uji ini, digunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) atau *Tolerance*. Indikator-indikator ini saling berkaitan karena Tolerance merupakan kebalikan dari VIF. Jika nilai dari VIF mencapai 10 lebih, atau nilai *Tolerance* dibawah 0,1, menunjukkan multikolinearitas yang signifikan. Uji ini digunakan untuk memastikan bahwa dalam penelitian, model regresi dapat memberikan estimasi yang akurat dan valid mengenai dampak variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Uji Heteroskedastisitas

Dalam analisis regresi, uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam variasi kesalahan atau residual antara dua pengamatan. Uji heteroskedastisitas penting dilakukan untuk memeriksa keabsahan uji hipotesis dalam model regresi, apakah uji hipotesis tersebut valid dan dapat dipercaya. Uji Glejser dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi dengan menganalisis hubungan antara residual dan variabel independen. Uji ini menguji hubungan antara nilai residual dengan nilai *absolut* (mutlak) dari variabel independen. Jika dalam uji heteroskedastisitas nilai signifikansi uji kurang dari 0,05, maka butuh perbaikan model regresi untuk mengatasi masalah ini.

1. Uji Linear Berganda

Uji linear berganda merupakan teknik untuk menguji apakah ada ketergantungan linear antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen dalam model penelitian. Dalam regresi linear berganda, estimasi parameter dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan jumlah kuadrat residual. Nilai dari variabel independen dan variabel dependen dapat digunakan untuk memprediksi persamaan regresi yang dihasilkan oleh uji linear berganda. Rumus dalam pengujian ini, sebagai berikut:

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + e

Keterangan:

Y : Variabel dependen (*tax evasion)*

X1 : Variabel independen pertama (kekuasaan koersif otoritas pajak)

X2 : Variabel independen kedua (kekuasaan legitimasi otoritas pajak)

X3 : Variabel independen ketiga (moralitas wajib pajak)

α : Konstanta

Β : Koefisien regresi

e : Residual

Pengujian regresi linear berganda menghasilkan bukti tentang adanya atau tidaknya korelasi linear yang signifikan antara model regresi dengan variabel terikat. Nilai VIF yang kurang dari 10 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas di antara variabel independen. Nilai DW yang mendekati angka 2 menandakan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada nilai residual. Jika uji Glejser memperoleh nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya heteroskedastisitas pada nilai residual.

1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah dalam model penelitian variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t (uji parsial) dan uji koefisien determinasi (R²) dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

1. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan menguji semua variabel independen secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini bertujuan untuk menilai kemampuan model regresi yang telah dibuat dalam menjelaskan varians yang terjadi pada variabel dependen.

Penggunaan Uji F untuk memberikan informasi apakah hubungan antara variabel independen dan vaiabel dependen dalam model regresi memiliki dampak yang signifikan. Dalam nilai signifikansi tertentu F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis penelitian ini dapat diterima, yang menunjukkan bahwa model regresi berdampak signifikan terhadap variabel dependen.

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t menentukan pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini menguji variabel independen secara terpisah untuk melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang diuji sebagai berikut:

H1 : Kekuasaan koersif otoritas pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion.*

H2 : Kekuasaan legitimasi otoritas pajak berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

H3 : Moral pajak berpengaruh positif terhadap *tax evasion*

Uji t memberikan informasi apakah setiap variabel independen berdampak signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Jika nilai dari t hitung lebih besar dari nilai t tabel. Dalam penelitian ini nilai signifikan t tabel sebesar 1,98498 maka hipotesis yang diuji dapat diterima, yang membuktikan bahwa variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji koefisien determinasi (R²) berguna untuk menentukan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki rentang nilai antara nol hingga satu (0-1). Nilai R² yang rendah menunjukkan bahwa model regresi yang dibangun tidak efektif dalam menjelaskan dan memprediksi variabel dependen menggunakan variabel independen yang ada. Sebaliknya, jika nilai semakin tinggi atau mendekati satu maka menunjukan efektivitas model regresi dalam menjelaskan variabel dependen menggunakan variabel independen.